

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

WILDAN SESAR PAMUNGKAS
B 200150009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

WILDAN SESAR PAMUNGKAS

B200150009

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Triyono S.E, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun
2015-2017)**

OLEH
WILDAN SESAR PAMUNGKAS
B 200150009

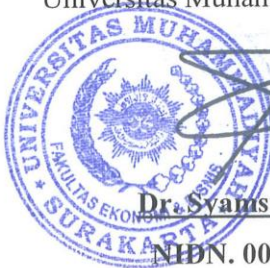
Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 23 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr. Triyono , S.E., M.Si ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Ph.D ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D. ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M

NIDN. 0017025701

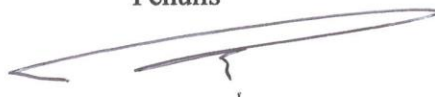
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Agustus 2019

Penulis



WILDAN SESAR PAMUNGKAS
B200150009

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-
2017)**

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD, DPMPTSP dan BPS Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota selama tiga tahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat uji yang digunakan meliputi uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk

Abstract

The purpose of this research to analyze the influence of government expenditure, investment and populations to the realization of the local revenue in the district or city in Central Java province in 2015-2017. This research used quantitative method with secondary data obtained from BPKAD, DPMPTSP and BPS districts and cities in Central Java year 2015-2017. Population in this research is all district or city in Central Java in 2015-2017. Amount of sample in this study were 35 district/city for 3 years. Method of sample collection used purposive sampling techniques. The analyst method used multiple linear regression tests. The result analysis can be conclude that the variable government expenditure and population numbers had an influence on the local revenue. Investments have no effect on the local revenue.

Keywords: local revenue, expenditure government, investments, populations

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kondisi ekonomi dan perekonomian yang beragam atau berbeda-beda dalam setiap daerah maka membutuhkan sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Maka dari itu pemerintah memberikan sistem otonomi pada Pemerintah Daerah dengan tujuan agar daerah tersebut mengatur rumah tangganya sendiri agar tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat, misalkan dalam kebijakan maupun masalah keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus memiliki kewenangan

atau kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan tersebut dengan baik.

Muncul sebuah konsekuensi bahwa dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu pendapatan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Gitaningtyas dan Kurrohman (2014). Untuk itu, sangatlah penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Beberapa tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017 :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (dalam juta rupiah), 2015–2017

Tahun	Jumlah Pendapatan (Juta Rupiah)	Kontribusi Dana Perimbangan (Juta Rupiah)	Kontribusi PAD (Juta Rupiah)	Kontribusi Dana Perimbangan (%)	Kontribusi PAD (%)	Pertumbuhan PAD (%)
2015	16.828.231	2.257.143	10.904.822	13,41	64,80	-
2016	19.632.577	8.017.298	11.541.030	40,83	58,78	5,83
2017	23.703.175	11.067.786	12.547.513	46,69	52,93	8,72

Sumber: BPS

Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa PAD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, terlihat dalam Tabel 1.1. Peningkatan PAD ditahun 2016 sebesar 5,83% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,72%. Namun peningkatan PAD di setiap tahun ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya membangun tingkat kemandirian daerah. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang tercermin oleh dana perimbangan yang ditransfer oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terus meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 kontribusi Penerimaan Provinsi Jawa Tengah yang didominasi oleh Pendapatan Asli daerah sebesar 64,80%, kemudian Dana Perimbangan sebesar 13,41%. Sedangkan pada tahun 2017 kontribusi Pendapatan Asli Daerah menurun secara signifikan menjadi 52,94%, kemudian Dana Perimbangan meningkat cukup besar menjadi 46,70%. Faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah karena masih terdapatnya sumber pendapatan potensial yang belum dapat digali dari suatu daerah Ifrizar et al., (2014).

Salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung adalah Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dengan melalui beban pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pengeluaran Pemerintah termasuk dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Apabila pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang membeli barang dan jasa, maka pengeluaran daerah mencerminkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan Sitaniapessy (2013). Beberapa tahun terakhir Pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat data Realisasi Belanja Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 berikut:

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Belanja (dalam juta rupiah) 2015–2017

tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)	%
2015	17.820.760	-
2016	19.354.375	7,92
2017	22.884.713	15,42
Rata-rata	20.019.949	

Sumber: BPKAD Jateng

Pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata sebesar 20.019.949. Dapat diketahui juga pengeluaran daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 15,42%. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah setiap tahun dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah investasi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sudah sangat pesat ternyata tidak terlepas dari pertumbuhan faktor utama proses investasi pembangunan, yaitu pembentukan modal. Investasi yang dimaksud adalah investasi swasta Kurniawan et al., (2017).

Meningkatnya investasi swasta diharapkan dapat memberikan pengaruh positif yang bersifat jangka panjang terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatnya investasi swasta akan diiringi dengan meningkatnya pajak dan retribusi daerah yang nantinya memberikan pengaruh positif untuk pendapatan asli daerah. Sesuai dengan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa apabila investasi swasta meningkat maka realisasi Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Meningkatnya realisasi PAD akibat bertambahnya investasi swasta juga akan berpengaruh terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu akan meningkatkan jumlah Pendapatan Daerah. Meningkatnya APBD di sisi Pendapatan Daerah akan membiayai pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu, apabila jumlah Pendapatan Daerah di APBD lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Daerah maka akan terjadi surplus APBD.

Menurut Todaro (2008) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Perwira & Widanta (2014) jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lain jumlah penduduk yang meningkat maka akan menambah pungutan pajak yang berupa wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga semakin banyak jumlah

penduduk, maka semakin besar pula realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perwira et al., (2018) dengan menambah satu variabel independen yang digunakan yaitu Investasi. Dikarenakan investasi memiliki spesialisasi dalam dalam perkebangan perekonomian dan berpengaruh dengan pendapatan asli daerah. Batik (2013) mengemukakan bahwa pengaruh investasi terhadap PAD sangat besar, oleh karenanya apabila investasi dapat masuk dalam suatu daerah, dampaknya akan semakin luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wadjaudje et al., (2018) berbanding terbalik yang menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dengan demikian, maka dibuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah”

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Di dalam penelitian ini, hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini diperoleh dari BPS, BPKAD dan DPMPTSP selama periode 2015-2017.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 6 daerah kota selama 3 tahun pengamatan, sehingga daerah total populasi adalah 105 data. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang

memiliki tujuan atau target tertentu dalam memilih serta secara tidak acak yang berdasarkan kriteria, yaitu :

- a. Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD Tahun 2015-2017 (data diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah).
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki data Jumlah Penduduk dan data Investasi PMDN Tahun 2015-2017 (data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah).

2.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang langsung dikelola pemerintah daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi daerahnya yang mampu menghasilkan pendapatan/penerimaan bagi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini jumlah pendapatan asli daerah diambil dari dalam Laporan Realisasi APBD dan diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah} \quad (1)$$

2.2.2 Variabel Independen

2.2.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kegiatan untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah Sukirno (2004) dalam Susanti et al., (2017).

Jumlah dana Pengeluaran Pemerintah untuk setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos Belanja dan Transfer dalam Laporan Realisasi APBD. Untuk data pengeluaran pemerintah diukur berdasarkan tahun lalu (t-1) dikarenakan pengeluaran pemerintah pada tahun sekarang akan memberi dampak terhadap pendapatan asli daerah setelah setahun berikutnya. Pengeluaran pemerintah diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran Pemerintah} = \text{Total Belanja} + \text{Total Transfer Keluar} \quad (2)$$

2.2.2.2 Investasi

Investasi dalam pengertian umum merupakan pengorbanan dana yang dikeluarkan saat ini untuk mendapatkan imbalan dana di masa yang akan datang. Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (PT). Variabel investasi untuk setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari Data Realisasi Investasi PMDN Jawa Tengah yang bersumber dari DPMPTSP. Variabel investasi dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Investasi} = \text{Investasi PMDN} \quad (3)$$

2.2.2.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada disuatu daerah/wilayah yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat di daerah tersebut. Penduduk suatu daerah/wilayah tidak sama kepadatannya dengan daerah/wilayah yang lain Juliasnsyah et al., (2018). Dalam penelitian ini data jumlah penduduk dapat dilihat dalam Data Sensus Penduduk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber pada BPS. Rumus perhitungan jumlah penduduk sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk} = \text{Penduduk Pria} + \text{Penduduk Wanita} \quad (4)$$

2.2.2.4 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan pengujian asumsi klasik, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \alpha + \beta_1 \text{PP} + \beta_2 \text{I} + \beta_3 \text{JP} + \beta_4 \text{LDR} + \varepsilon \quad (5)$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

PP : Pengeluaran Pemerintah

I : Investasi

JP : Jumlah Penduduk

ε : Residual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Regresi Linier

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
Konstanta	-469455253057,170	0,186	0,853
PP	0,548	6,712	0,000
I	-0,015	-0,156	0,877
JP	-299377,700	-1,574	0,121
Rsquare	= 0,537	Fhitung	= 21,669
Adjusted Rsquare	= 0,733	Sig	= 0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 8037815271,916 + 0,2108PP - 0,001I - 66730,951JP + \varepsilon \quad (6)$$

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov Test*. nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,080 dan variable memiliki nilai probabilitas 0,200. sehingga dapat disimpulkan bahwa variable dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov	p-value	Keterangan
Unstandarized Residual	0,200	0,092	Data terdistribusi normal

Sumber : data diolah 2019

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PP	,497	2,010
	I	,964	1,038
	JP	,491	2,036

Sumber : data diolah 2019

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. hasil *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variable independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-26,568	46,750		-,568	,572
	LNPP	4,089	2,054	,346	1,991	,051
	LNI	-,164	,169	-,126	-,971	,336
	LNJP	-2,538	1,451	-,304	-1,750	,086

Sumber : Data diolah 2019.

Hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji glejser dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai $\text{sig} \geq 0,05$. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen *Unstandardized Residual*. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Pengujian Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-8354483644,01343
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	29
Z	-,521
Asymp. Sig. (2-tailed)	,602

Sumber : data diolah 2019

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run test*. Model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil uji menunjukkan probabilitas 0,602 signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar residual.

3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi model atau sering disebut juga Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel PP, I, dan JP secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Adapun hasilnya diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 21,669 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,76 dan didukung dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel PP, I dan JP secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah.

3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Besarnya nilai konstanta 8037815271,916. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah penduduk diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka besarnya variabel pendapatan asli daerah yang di ukur sebesar 8037815271,916.

Besarnya nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,210 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,210 dengan asumsi variabel yang konstan. Variabel Pengeluaran Pemerintah diketahui nilai t_{hitung} sebesar 6,712 lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ (0,05). Oleh karena itu, H_1 diterima. Artinya, Pengeluaran

Pemerintah mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Besarnya nilai koefisien variabel investasi sebesar -0,001 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan menurun sebesar -0,001 dengan asumsi variabel yang konstan. Variabel Investasi diketahui nilai t_{hitung} sebesar -0,156 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,887 > \alpha (0,05)$. Oleh karena itu, H1 ditolak. Artinya, Investasi PMDN tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besarnya nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar -66730,951 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan menurun sebesar -66730,951 dengan asumsi variabel yang konstan. Variabel Jumlah Penduduk diketahui nilai t_{hitung} sebesar -1,574 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,121 < \alpha (0,05)$. Oleh karena itu, H1 ditolak. Sehingga, Jumlah Penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen sangat terbatas. Apabila nilai mendekati angka 1 maka semakin besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji R^2 diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai R Square sebesar 0,537 atau 53,7%. Hal ini berarti bahwa 53,7% variasi variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PP, I dan JP. Sedangkan 46,3% dijelaskan oleh faktor-faktor luar model yang diteliti.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel pengeluaran pemerintah diketahui nilai t_{hitung} sebesar $6,712 > t_{tabel}$ 2,000 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan. Dalam penelitian ini Pengeluaran Pemerintah dengan hasil nilai koefisien positif dapat diartikan bahwa semakin banyaknya pengeluaran pemerintah maka semakin meningkatnya pendapatan asli daerah.

Wagner telah mengemukakan teori bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat, secara relatif pendapatan perkapita pun akan meningkat. Didukung dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melakukan pembangunan. Pernyataan ini dibuktikan dengan data reasalisasi anggaran pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun lalu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tahun sekarang. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 13,02% yang dapat meningkatkan peningkatan PAD tahun berikutnya 2015-2017 dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 7,27%. Anggaran yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan maupun kegiatan pembangunan. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan maka akan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila kegiatan ekonomi masyarakat meningkat maka akan meningkatkan pula aliran pendapatan asli daerah.

Hal ini mengasumsikan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur dalam sektor fasilitas umum seperti dalam bidang kesehatan, tempat perdagangan/pasar, tempat wisata, dan membangun BUMD yang dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan sehingga meningkatkan jumlah retribusi yang merupakan salah satu komponen dalam sumber pendapatan asli daerah. Abimanyu (2005:40) dalam Kurniawan et al., (2017) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang meningkat dan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian variabel ini didukung oleh Kurniawan et al., (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti et

al., (2017) dan Perwira et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3.6.2 Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel investasi diketahui nilai t hitung sebesar $-0,156 < t$ tabel 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,877 > 0,05$ artinya H_2 ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Investasi belum memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data Investasi PMDN Provinsi Jawa Tengah tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan PAD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data DPTPTSP Jateng investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 s/d 2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 19,7 triliun per tahun. Jika dilihat dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir perkembangan investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang relatif besar, pada tahun 2016 peningkatan investasi sebesar 35,97% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan investasi yang negatif.

Investasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan investasi padat modal terutama di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sehingga memberikan kontribusi yang sedikit terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data DPMPTSP pada tahun 2016 investasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menduduki nilai tertinggi kedua dengan jumlah investasi senilai 3,51 triliun. Pada tahun 2017 sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi memiliki nilai investasi tertinggi sebesar 6,66 triliun atau yang memiliki kontribusi terbesar dengan nilai 33% dari total investasi PMDN yang masuk di Provinsi Jawa Tengah. Kurangnya investasi di dalam sarana produksi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena saat ini faktor-faktor produksi yang ada belum dimanfaatkan secara penuh.

Wadjaudje et al., (2018) Menjelaskan bahwa dalam SAP investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Investasi pemerintah dalam aset tetap tidak sama dengan investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis, dimana manfaat ekonomi dari investasi pemerintah dalam aset tetap tidak akan langsung dinikmati pemerintah dalam bentuk hasil imbal investasi namun kadang-kadang dapat berupa

peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kurniawan, et al., (2017) yang berpendapat bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wadjaudje et al., (2018) yang menyatakan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk

Variabel jumlah penduduk diketahui nilai t hitung sebesar $-1,574 < t$ tabel 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,121 > 0,05$ maka H_3 ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutu sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Selain itu yang menjadi penyebab yaitu jumlah penduduk usia produktif yang relatif lebih besar akan tetapi unsur didalamnya bukan kategori angkatan kerja, seperti siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga dan kategori angkatan kerja akan tetapi pengangguran serta terdapat beberapa jumlah penduduk yang tidak produktif. Menurut data BPS total penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 26.062.003 jiwa. Banyaknya penduduk angkatan kerja sebanyak 18.010.612 jiwa dalam angkatan kerja terdapat juga pengangguran sebesar 823.938 jiwa, sehingga jumlah penduduk yang aktif bekerja sebanyak 17.186.674. Kemudian jumlah bukan angkatan kerja seperti anak-anak, siswa sebesar 8.051.391 atau dapat dihitung sebesar 30,90% dari total penduduk jawa tengah pada tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa masih ada jumlah penduduk sebesar 30,90% dari total penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Beberapa hal lain seiring dengan terjadinya banyak penduduk yang melakukan urbanisasi maka ada beberapa dampak negatif terhadap daerah asal yaitu dengan hilangnya tenaga kerja untuk industri-industri kecil menengah dan perkebunan yang berada di setiap kabupaten yang dapat menghasilkan suatu produk daerah yang berujung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro yang menyatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga,

melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat cepat laju migrasi dari desa ke kota.

Jumlah penduduk belum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian. Menurut data BPS jumlah penduduk yang berkerja di sektor pertanian untuk tahun 2017 sebesar 4.323.993 jiwa dengan presentasi 0,25%, sektor perdagangan sebesar 0,23%. Jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor pertanian atau masih banyaknya jumlah penduduk yang mata pencahariannya bertani, dimana sektor pertanian mempunyai kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini didukung oleh Batik (2013) tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh peneliti lain Juliasnsyah (2018) menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai t hitung sebesar $6,712 > t$ tabel 2,000 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
- b. Variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai t hitung sebesar $-0,156 < t$ tabel 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,877 > 0,05$.
- c. Variabel jumlah penduduk diketahui berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai t hitung sebesar $-1,574 < t$ tabel 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,121 < 0,05$.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal untuk peneliti-peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan terhadap seluruh Provinsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini hanya memasukkan variabel investasi PMDN sehingga tidak memasukkan variabel investasi asing, sehingga kemungkinan akan menyebabkan hasil yang berbeda apabila investasi dihitung berdasarkan total investasi.

4.3 Saran

Atas dasar simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel total investasi, atau lebih baik membedakan investasi dalam negeri dan investasi asing.
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah beberapa variabel yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah seperti contoh, dana perimbangan, belanja modal, tenaga kerja, jumlah perusahaan, luas wilayah daerah dan lain-lain.
- c. Untuk penulis selanjutnya dapat memperluas objek penelitian. Dengan menggunakan sampel provinsi yang ada di Indonesia, mengingat terdapatnya 34 provinsi di Indonesia. Sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan terhadap pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asmuruf, Makdalena F, Rumat A Vikie dan Kawung, M.V George. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Bahmid, Nabila Suha. 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(ISSN : 1693-7597).
- Batik, Karlina. 2013. Analisa Pengaruh Investasi, PRDB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1).
- Fahme, Noverio Faturahman. 2013. Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Selatan. *Jurnal EMBA*, Desember, 1(4), pp. 849-857.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ifrizar, Darwanis Sulaiman. 2014. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), pp. 33-41.
- Juliasnsyah, Hijri dan Sulkandria 2018. Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simuelue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2).
- Kurniawan, Agus Indriatno; Militina, Theresia dan Suharto, Rachmad Budi. 2017. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, pp. 82-91.
- Lakot, Toar Walaney; Engka, S.M Daisy dan Yumangkeng, Y.L Steeva. 2016. Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Lestari, Diana. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Conference on Management and Behavioral Studies*.
- Lestari, Wiji; Suharno dan Kristianti, Djoko 2017. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Perusahaan dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Volume 13, pp. 159-168.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayza, Miragustia; Masbar, Raja dan Nasir, Muhammad. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), pp. 9-16.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Perdana, Putu Lia .2014. Analisis Variable-variabel yang Mepengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2).
- Perwira, Gde Bhaskara dan Widanta, Bagus Putu. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal EP Unud*, 3(5).

- Perwira, Ryan; Ridwan dan Fattah, Vitayanti. 2018. Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, 6(2), pp. 1-15.
- Rosmalia, Johana; Iskandar, Rusdiah dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Regional Domestik Bruto dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 5(2).
- Sitaniapessy, Harry A.P. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Journal Economica*, 9(1).
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Press.
- Sulfiana, Arum; Syafi'i dan Susanti, Widya. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PAD Kota Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3).
- Sunandar, Gufron Reynaldin. 2017. Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi*.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Susanti, Hewi; Syechalad, Mohd Nur dan Hamzah, Abubakar 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1).
- Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Wadjaudje, Dzakiyyah Ulfah; Susanti, Santi dan Pahala, Indra. 2018. Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisata dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JE & KP*, 5(2).